

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Rupinus¹, Arifin², Tora Akadira³

Universitas Terbuka^{1,3}, Universitas Tanjung Pura Pontianak²
Rupinus.roep.rr@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek lingkungan sosial, ekonomi, politik dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor eksternal dan internal yang menentukan implementasi program wajib belajar sembilan tahun. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan orangtua siswa, kebijakan politik pendidikan di daerah, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur teknologi serta masalah transportasi dan jarak tempuh siswa dari dan menuju sekolah. Simpulan, berbagai faktor ini belum mendapatkan perhatian dan pengembangan maksimal sehingga berdampak pada kurang berdampak implementasi program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.

Kata Kunci: Akses, Kesetaraan, Pemerataan, Wajib Belajar

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Intellectual Capital on company value with financial performance as an intervening variable. The population in this study includes companies registered in LQ45 consecutively during the 2018-2022 period. The analysis technique applied is multiple linear regression and the Sobel test using financial performance as an intervening variable. The research results show that Intellectual Capital has a positive effect on Financial Performance, Financial Performance has a positive effect on Company Value, and Intellectual has no effect on Company Value. It is concluded that the results of this research prove that Intellectual Capital has a positive effect on Company Value and mediates Financial Performance.

Keywords: Intellectual Capital, Financial Performance, Company Value.

PENDAHULUAN

Program Wajib Belajar Sembilan tahun menjadi tanggungjawab negara karena setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, adil, setara dan merata. Hak pendidikan tersebut tidak hanya sebatas mendapatkan pendidikan formal semata namun mencakup perolehan akses pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang bermutu dan mendapatkan lingkungan belajar dan fasilitas dan layanan pendidikan yang baik dan memadai (Dike, 2017).

Masyarakat memiliki peran dan kewajiban dalam memberikan atau menyediakan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, serta berkewajiban menyediakan layanan dan dana bagi terselenggaranya pendidikan bagi siswa berusia 7-15 tahun. Layanan ini memiliki perintah yuridis bahwa pendidikan dasar 9 atau 12 tahun merupakan

pendidikan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap anak-anak yang lahir dari rahim Indonesia. Pendidikan dasar untuk anak-anak usia 7-15 tahun merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Bahkan saat ini adanya wacana kuat bagi para calon presiden untuk menyediakan akses pendidikan gratis bagi pendidikan dasar di jenjang PAUD sampai SMA/SMU/SMK.

Implementasi pesan konstitusional tersebut dalam pelaksanaannya di setiap wilayah dan daerah memiliki tantangan dan kesulitan yang beragam (Rulinawaty et al., 2023). Tantangan dan kesulitan tersebut bisa bersumber dari kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik maupun dari aspek sosiologis, geografis, topografis maupun kesiapan infrastruktur pendidikan setiap satuan pendidikan di masing-masing daerah. Implementasi program wajib belajar sembilan tahun tidak lepas dari kondisi dan faktor-faktor tersebut yang sangat menentukan keberhasilan program wajib belajar (Rulinawaty et al., 2024). Evaluasi wajib belajar sembilan tahun dalam implementasi kebijakan baru wajib belajar 12 tahun diungkapkan bahwa wajib belajar sembilan tahun belum tuntas dan rampung sehingga program wajib belajar 12 tahun perlu memperhatikan jalannya wajib belajar sembilan tahun yang sudah diprogramkan lebih dahulu. Seto Mulyadi penggiat anak mengungkapkan bahwa ia mendukung wajib belajar 12 tahun, tetapi tidak mengabaikan nasib wajib belajar 9 tahun yang belum tuntas sebab angka putus sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama masih memprihatinkan, bahkan di kota besar masih ada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang putus sekolah (Indra, 2012).

Angka putus sekolah di kabupaten Sintang masih cukup tinggi, hal ini diakui oleh sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sintang. Dalam sebuah wawancara dengan Tribun Pontianak tahun 2017 diungkapkan bahwa angka putus sekolah atau *dropout* masing tinggi di kabupaten Sintang. Masa sekolah hanya berlangsung sekitar 6-7 tahun artinya sebatas tamat SD atau hanya mampu bersekolah di kelas 1 SMP dan setelah itu putus sekolah (Abraham, 2017). Dari grafik tingkat pendidikan di kabupaten Sintang jenjang TK ke SMA/SMK terlihat jelas bahwa pada usia sekolah jenjang SMP dan SMA/SMK grafik jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan mengalami penurunan dari sisi jumlah yang melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK.

Pelaksanaan kebijakan wajib belajar tingkat SLTP/MTs menunjukkan belum mengalami ketuntasan (34,14) atau dengan kata lain bahwa anak yang berumur 13 sampai dengan 15 tahun, 34,14% bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, selebihnya tidak melanjutkan atau putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa masalah seperti; masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan guna memutuskan mata rantai kebodohan dan kemiskinan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; faktor geografis serta letak sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk; tidak ada prasarana yang memadai untuk menuju pusat pendidikan yang ada di wilayah tersebut; kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun belum dapat terealisasi secara baik. Dinas Pendidikan belum melaksanakan sepenuhnya kebijakan tersebut, salah satunya sosialisasi yang belum menyentuh target group anak-anak didik sehingga belum optimal (Rulinawaty, 2013).

Kebijakan pemerintah tersebut menguatkan dan membangun suatu optimisme yang besar bagi masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Harapan ideal tersebut dalam konteks pendidikan dan akses pendidikan di daerah masih mengalami masalah atau kendala klasik seperti kondisi

pendidikan di kecamatan Dedai. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat empat agenda prioritas pemerintah belum berjalan optimal di daerah pedalaman atau perbatasan. Faktor penyebab tersebut adalah: Faktor sosial dan ekonomi turut memberi andil meskipun program pemerintah seperti bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sudah cukup menolong siswa dari kalangan ekonomi lemah namun belum semua siswa bisa mengakses pendidikan secara setara, adil, dan merata; Faktor pendidikan dan wawasan orang tua yang rendah. Faktor tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah cenderung berpengaruh pada tingkat penghasilan yang rendah pula, sehingga tidak mencukupi untuk investasi pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi ini menyebabkan anak-anak secara terpaksa bekerja atau dijadikan sebagai aset ekonomi untuk meringankan beban ekonomi keluarga; Faktor penyebab lainnya adalah daerah tempat tinggal (desa/kota) yang jauh dari lokasi sekolah dengan akses transportasi yang sulit dan mahal menyebabkan pihak keluarga dan pihak siswa sendiri memilih untuk meninggalkan sekolahnya. Anak-anak di pedalaman yang jauh dari akses transportasi memilih berjalan kaki dengan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki.

Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Manfaatnya memberi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun, sehingga pemerintah mampu menemukan alternatif kebijakan pendidikan yang mendukung ketercapaian atau keberhasilan program pendidikan untuk masyarakat (Rulinawaty et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di dua sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai. Pemilihan lokasi ini menggunakan teknik *purposive sampling area*. Subyek penelitian dari riset ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, orangtua, camat, dan pengawas sekolah.

Data-data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri data data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan data primer dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan pengamatan langsung atau obyek yang diteliti dan kegiatan wawancara yang ditujukan kepada informan yakni sumber data yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik pengumpul data primer dan data sekunder

Pengumpulan data dalam kegiatan riset kualitatif harus terkondisi secara natural dan alamiah (*natural setting*), dengan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam serta studi dokumentasi yang relevan sesuai dengan topik dan variable penelitiannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman yaitu reduksi data, display dan verifikasi data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Gambaran pendidikan di kecamatan Dedai cukup variatif baik dari sisi kuantitas sekolah pada setiap jenjang, kondisi dan sarana prasarana, jumlah guru dan

jumlah siswa, jumlah rombongan belajar, staf dan pegawai serta fasilitas dan sarana pendukung kegiatan belajar seperti fasilitas laboratorium dan perpustakaan sekolah. Di kecamatan Dedai ada 28 sekolah dasar negeri dengan jumlah peserta didik pada satu sekolah berada di kisaran terendah adalah 19 siswa dan paling banyak sebanyak 230 siswa. Bila dikategorisasi sekolah dengan jumlah siswa pada rentang diantara rata-rata 1-50 siswa maka ada sebanyak 3 sekolah atau 10,7% , sekolah dengan jumlah siswa berkisar diantara 51-100 siswa ada 7 sekolah atau 25 %, sekolah dengan jumlah siswa diantara 101-150 sebanyak 11 sekolah atau 39,2%, sekolah dengan jumlah siswa di kisaran 151-200 siswa sebanyak 4 sekolah atau 14,2%, dan sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 200 siswa sebanyak 3 sekolah atau 10,7 %.

Dari data ini tergambar bahwa mayoritas jumlah siswa satu sekolah dominan berkisar diantara 50-150 siswa atau sebesar 64,2 %. Bahkan ada 3 sekolah yang muridnya sangat minim yaitu dibawah 50 siswa. Secara kuantitas siswa terbanyak pada satu sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 200 siswa hanya ada 3 sekolah saja. Ketiga sekolah ini berada di pusat kota kecamatan. Dari total 28 sekolah jumlah siswa yang tertampung sebanyak 3.432 siswa dengan jumlah rombel sebanyak 180 rombel, jumlah total guru sebanyak 216 tenaga pendidik dan staf pegawai sejumlah 28 orang, tenaga laboratorium hanya 1 orang dan tenaga perpustakaan sebanyak 22 orang.

Bila dirasiokan antara jumlah guru dan jumlah siswa dari jumlah siswa dan jumlah guru yang ada di sekolah-sekolah kecamatan Dedai secara keseluruhan masih cukup ideal karena satu guru mendampingi 16 siswa. Namun bila dibedah per kasus pada setiap sekolah pemerataan guru di sekolah belum dilakukan secara baik. Contohnya ada sekolah seperti SDN 19 Kebah, ada 37 siswa ada 6 rombel dan hanya 1 guru saja yang mengajar, dan dibantu oleh satu staf atau pegawai. Yang menjadi masalah adalah apakah 1 guru tersebut bisa mengajar 6 kelas untuk sekian banyak mata pelajaran? siapa yang menjadi kepala sekolahnya? siapa yang akan melakukan supervise dalam kegiatan pembelajarannya? Meskipun ada 1 pegawai yang membantu kegiatan administrasi dan bisa saja ikut membantu mengajar bila kualifikasinya memenuhi namun tetap sulit karena pada jam yang sama mereka harus menangani 6 rombel. Jika rombelnya digabung antara kelas 1,2,3 satu rombel dan kelas 4,5,6 satu rombel tentu menjadi persoalan terkait materi ajar dan capaian kompetensi yang berbeda pada setiap jenjang atau fasenya. Disisi lain ada sekolah yang gurunya cukup banyak, seperti di SD Negeri 13 Sungai Tapang, jumlah siswanya ada 66, ada 6 rombel dengan 7 guru yang menjadi tenaga pendidik pasti lebih baik. Artinya di sekolah ini satu guru menangani 9 atau 10 siswa dibantu oleh satu tenaga pegawai yang menangani administrasi. Dari sisi jumlah guru seharusnya bisa didistribusi ke sekolah yang hanya memiliki 1 guru, sehingga ada keseimbangan, ada keadilan dan ketaraan untuk mendapatkan akses pembelajaran, dan akses mutu pembelajaran sehingga tidak terjadi ketimpangan yang melebar terkait jumlah guru di setiap sekolahnya dengan perbandingan jumlah siswa dan rombongan belajarnya.

Dari sisi fasilitas seperti perpustakaan dari 28 sekolah dasar di kecamatan Dedai, ada 9 sekolah yang belum memiliki perpustakaan atau ruang perpustakaan, demikian juga dari 28 sekolah hanya 1 sekolah yang mempunyai atau memiliki laboratorium. Kondisi sarana prasarana dan infrastruktur yang minim bahkan belum ada menjadi ciri khas yang dominan mewarnai sekolah-sekolah pedalaman. Ini persoalan klasik yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan dan diatasi meskipun sudah menggerakkan program wajib belajar Sembilan tahun. Beberapa potret fasilitas sekolah

berikut dapat memberi satu gambaran tentang kondisi minimnya sarana prasarana sekolah pedalaman di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

Dari beberapa persoalan ini dapat dipahami bagaimana implementasi program wajib belajar sembilan tahun menjadi sebuah keharusan dan perlu ada perbaikan mendasar baik fasilitas dan sarana pendidikan maupun fasilitas public yang menyokong pelaksanaan program pendidikan wajib belajar Sembilan tahun untuk mencegah meningkatnya angka putus sekolah yang masih tinggi di kecamatan Dedai dan Kabupaten Sintang. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya fasilitas, sulitnya sarana transportasi dan jarak tempuh serta medan jalan yang sulit dan rusak apalagi dimusim penghujan(Rulinawaty et al., 2020).

PEMBAHASAN

Faktor Lingkungan Sosial dan Ekonomi Orang Tua

Permasalahan kependidikan tidak lepas dari hubungannya dengan ruang sosial dan ekonomi dari masyarakat dimana mereka bertempat tinggal, bekerja dan mencari penghasilan hidup. Ruang sosial dalam arti fisik dan lokasi seperti faktor geografi turut mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari gambaran umum factor sosial yang diuraikan sebelumnya bahwa secara sosial masyarakat di kecamatan Dedai adalah masyarakat petani ladang, petani sawah tadah hujan, pekerja kebun, sebagai petani ladang, yang memiliki kebun karet atau sawit atau yang bekerja pada perusahaan sawit sebagai buruh kasar dengan gaji yang tidak terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari hasil observasi terhadap tingkat sosial dan ekonomi masyarakat kecamatan Dedai dan secara khusus dari data BPJS Kabupaten Sintang 2023 memperlihatkan bahwa dari 31 Desa yang ada di kecamatan Dedai Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani ladang, petani karet atau petani sawit (Tim Wikipedia Kabupaten Sintang, 2023). Kenyataan ini diafirmasi oleh kepala sekolah yang menegaskan bahwa:

“Di kecamatan Dedai kebanyakan orangtua murid yang ada di wilayah ini bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, dan kebanyakan pendidikan orang tua murid yang ada di kecamatan Dedai tidak tamat sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP), dan ada sebagian kecil yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut pengakuan orangtua bagi mereka untuk bekerja di lahan sawit atau karet tidak perlu pendidikan yang tinggi, dan pekerjaan sebagai petani karet dan sawit merupakan pekerjaan yang diwariskan atau hanya meneruskan budaya kebiasaan orang tua mereka.”

Permasalahan pendidikan tidak lepas dari peran lingkungan sosial, ekonomi, mata pencaharian masyarakat, tempat tinggal dimana masyarakat menjadi satu komponen ruang dan waktu sosial. Secara geografi ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Ruang geografis adalah pusat dibangunnya ekonomi masyarakat, jadi tempat, lokasi, keadaan alam menentukan tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian bermuara pada komponen pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sintang dan camat Dedai memiliki satu pandangan yang sama bahwa, “kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan dimana orang tua siswa adalah petani, buruh dan pedagang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak-

anak mereka. Kemampuan ekonomi dan sosial orangtua sangat menentukan dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Di SMP Negeri maupun Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dari hasil penelitian sebagai berikut Jumlah tanggungan keluarga Orang Tua Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri maupun Swasta untuk biaya pendidikan siswa Kecamatan Dedai rata-rata 3-5 orang dalam satu keluarga petani ladang, karet dan sawit dapat dikategorikan beban tinggi. Beban tanggungan orangtua yang tinggi menghambat implementasi program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Dari sisi latar sosial pendidikan mayoritas orangtua yang bekerja sebagai petani ladang, petani karet dan sawit umumnya tidak tamat sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP), hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingkat pendidikan orangtua siswa yang mayoritas pendidikan renda ikut berpengaruh secara sosial terhadap akses dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan hadirnya program wajib belajar Sembilan Tahun di kecamatan Dedai telah menstimulus tumbuhnya kesadaran untuk sekolah dan memperoleh pendidikan yang baik. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang disimpulkan bahwa orang tua yang tinggal dalam lingkungan masyarakat yang cukup berpendidikan telah mendorong dan memotivasi anak-anak untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan mereka bahkan adanya kesadaran sosial masyarakat, orangtua dan anak-anak untuk lanjutkan ke jenjang selanjutnya minimal mampu menyelesaikan jenjang pendidikan di jenjang sekolah menengah atas.

Faktor Transportasi dan Jarak Tempuh

Kendala pendidikan juga tidak hanya karena beban biaya ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan orangtua namun juga disebabkan oleh faktor transportasi oeh jara tempuh, mahalnya biaya transportasi dan sulitnya medan jalan dan jarak yang jauh. Komponen jarak tempuh oleh ahli geografi lebih memahami sebagai bagian menarik dari distribusi suatu kawasan dengan karakteristik iklim, tanah, vegetasi serta budaya masyarakat yang hidup di dalamnya. Ada beberapa hal yang signifikan antara biaya dan jarak yang berpengaruh pada ongkos pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua siswa yang berperan dalam kepengurusan komite sekolah mengungkapkan kondisi nyata yang dialami terkait akses transportasi dan jarak tempuh serta medan dan kondisinya seperti berikut:

“Jarak dari siswa dari rumah menuju ke sekolah di sebagian besar wilayah kecamatan Dedai Kabupaten Sintang cukup jauh, siswa harus menpuh jarak yang jauh dan harus melawati bukit, sungai dan hutan dengan durasi waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Situasi ini yang menghambat dan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.”

Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan sukarnya suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya dengan kondisi jalan yang kurang baik. Kondisi jalan di Kecamatan Dedai masih dalam kategori kurang baik, berlumpur dan berlubang dengan kedalaman yang cukup dalam, becek tergenang

air serta licin sehingga membuat siswa di daerah ini sulit untuk menuju ke sekolah dengan akses yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diungkapkan bahwa pada umumnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang masalah transportasi. Hanya masyarakat atau siswa yang memiliki kendaraan saja yang bisa dengan mudah bisa mendapatkan akses pendidikan sedangkan sebagian besar lainnya pergi kesekolah dan pulang sekolah dengan berjalan kaki.

Faktor Politik dalam Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang di Kecamatan Dedai dalam kebijakkan wajib Belajar sembilan tahun dalam upaya meningkatkan pendidikan memiliki beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta dalam diungkapkan bahwa.

“...ketersediaan sarana untuk sekolah dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh sekolah-sekolah dalam menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung, sarana komunikasi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan evaluasi rutin setiap bulan oleh Dinas Pendidikan. Kedua, ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang sudah sangat peduli dengan pendidikan, hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan dalam bidang pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD dimana jumlahnya berkisar 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan pendidikan.”

Dari total jumlah pegawai negeri di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang yang berjumlah 472 orang, lebih dari setengahnya merupakan pegawai dinas pendidikan. Jumlah ini mayoritasnya merupakan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia bidang pendidikan sudah sangat memadai. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penegasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakkan program wajib belajar sembilan tahun menjelaskan bahwa:

“...kebijakan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dalam upaya meningkatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun masih menemui beberapa hambatan seperti persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Jumlah tenaga pengajar berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota kecamatan, sementara di pedesaan daerah pedalaman masih sangat minim jumlahnya. Kondisi ini diperparah dengan pemahaman yang minim dari masyarakat desa dan pedalaman terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan maupun indeks pembangunan manusia di Kecamatan Dedai.”

Terkait kebijakan pendidikan kepala Sekolah SMP Negeri maupun Swasta di Kecamatan Dedai mengeluhkan kurang jelasnya pelimpahan wewenang terkait kebijakan program wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, dinas pendidikan sampai ke level sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diungkapkan bahwa:

...Dinas Pendidikan telah melakukan perencanaan partisipatif secara bottom-up planning dengan melibatkan sekolah bersama masyarakat dari tingkat yang paling bawah melalui sosialisasi. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di lapangan masih menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama terjadi di pedesaan. Kemudian, untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran kegiatan yang berfokus pada tujuan pencapaian output saja sesuai item kegiatan semata.”

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang digariskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 terdapat tiga tantangan besar bidang pendidikan di Indonesia (Basar, 2021; Parida, 2019; Setiawati, 2020), yaitu mempertahankan hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja global; dan sejalan dengan berlakunya otonomi daerah maka sistem pendidikan nasional perlu melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pendidikan di daerah perlu dikembangkan dan diimplementasikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebagai bagian dari kesiapan sekolah di daerah untuk meningkatkan peran sekolah dan masyarakat (*stakeholder*) bagi pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan bermutu jika lulusan dapat ditingkatkan. Melalui MBS setiap sekolah diberi kebebasan dan kewenangan besar kepada sekolah dengan serangkaian tanggung jawab (Kemendikbud, 2019; Nurkolis et al., 2020). Dengan dialihkannya kewenangan pengambilan keputusan ke tingkat sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat termasuk dalam upaya menjalankan program wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun.

Desentralisasi pendidikan mempunyai implikasi strategis. Sejauh ini, pendidikan sentralisasi telah berkembang menjadi perluasan sistem birokrasi, berdampak pada lembaga pendidikan yang kegiatannya didominasi oleh intervensi birokrasi pemerintah dan tidak terakomodasinya karakteristik lembaga pendidikan karena kepentingan pragmatis dalam mengejar target yang telah dirancang pemerintah pusat (Afandi et al., 2022). Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan setiap sekolah jarang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang sebenarnya dan penciptaan akses pendidikan yang bermutu, merata dan adil belum tercipta dan terwujud di sekolah (Amtu, 2011). Sampai saat ini akses infrastruktur dasar pendidikan di daerah, persoalan transportasi, listrik dan internet masih bermasalah sehingga sulit memenuhi capaian pendidikan wajib 9 tahun dilaksanakan secara berhasil di daerah. Inilah kendala yang menjadi juga persoalan yang sulit diselesaikan pada level daerah karena persoalan desentralisasi dan penerapan manajemen sekolah masih terkendala dengan kebijakan pendidikan dan kesiapan infrastruktur dasar pendidikan di daerah.

Faktor Lingkungan Infrastruktur Teknologi

Teknologi merupakan suatu kesatuan yang integral mendukung program wajib belajar sembilan tahun dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. Pentingnya menguasai teknologi tidak terlepas dari indikator teknologi seperti infrastruktur teknologi, sarana kemajuan, aset dalam pencapaian tujuan dan inovasi pendidikan sesuai suatu standar mutu teknologi di setiap satuan pendidikan (Dike, & Parida, 2016). Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang terkait teknologi dalam program wajib belajar sembilan tahun disimpulkan bahwa:

....Teknologi merupakan suatu sarana dalam memajukan kualitas sumberdaya manusia, sesuai dengan kemampuan melakukan transformasi teknologi (alih teknologi modern), yang menjadi aset investasi individu yang mampu menguasai IPTEK dan menjadi inovasi bagi perkembangan dunia pendidikan dan teknologi.”

Mengenai penguasaan teknologi di wilayah sekolah kecamatan Dedai mengalami beberapa kendala dalam implementasinya. Orangtua siswa yang menjadi pengurus Komite Sekolah menyatakan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru dan siswa di sekolah Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru dan siswa dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal yang belum memadai yang disebabkan juga oleh ketersediaan listrik.

Pengetahuan teknis guru dan siswa tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas juga menjadi kendala belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Aspek lain adalah ketakutan akan dampak negatif dari penggunaan alat berupa handphone (HP) dan laptop di sekolah. Hal ini juga belum adanya kebijakan pemanfaatan handphone dalam pembelajaran di kelas. Sekolah belum berani dan belum membuat kebijakan yang jelas dengan pedoman yang jelas karena sebagian besar guru dan orangtua masih memiliki pertimbangan etis dan masih kuatnya perasaan takut akan penyalahgunaan teknologi sehingga sampai saat ini sekolah melarang siswa membawa hand phone ke sekolah.

Pada level guru masih banyak guru masih belum mampu mengintegrasikan TIK dalam pengajaran mereka sehingga sikap guru terhadap TIK merupakan faktor dalam penerapan TIK dalam pengajaran. Bukti empiris untuk mengklaim bahwa kepercayaan guru tentang praktik mengajar adalah penting dalam menjelaskan mengapa guru mengadopsi teknologi digital untuk pengajaran. Banyak guru takut menggunakan TIK dalam pengajaran mereka dan menjadi cemas ketika harus menggunakan pengetahuan TIK karena belum terbiasa dan terlatih secara terampil dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran mereka. Kondisi ini merupakan masalah klasik dimana guru di daerah dan sekolah pedalaman merasakan sulitnya memiliki akses komputer. Guru sendiri mengidentifikasi kekurangan jumlah komputer, jumlah salinan perangkat lunak, dan kurangnya akses internet simultan sebagai hambatan utama untuk implementasi TIK di institusi pendidikan. Meskipun dari sisi mutu aksesibilitas sumber daya TIK tidak menjamin keberhasilan implementasi dalam pengajaran (Candls, 2019; Wasley et al., 2004).

Faktor Pendidikan Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri maupun Swasta terkait dengan pendidikan khususnya orang tua murid dalam penelitian ini menyatakan bahwa :

Orang Tua Murid yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi akan mempunyai dorongan untuk memperbaiki hidupnya dan keluarganya, disamping akan memberikan pertimbangan yang rasional dalam menghadapi suatu masalah yang berpengaruh pada pandangan dan wawasannya. Demikian juga dengan pendidikan anak mereka, orang tua akan memotivasi yang besar untuk menyekolahkan anak mereka.

Dengan demikian jelas bahwa perbedaan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kesempatan pendidikan anak dan terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan orang tua dan tingkat pendidikan anak. maksudnya bahwa orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pula pada pendidikan anak mereka agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya, begitu pula fenomena yang terjadi di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan sesamanya manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai makhluk sosial, sesuai kodratnya manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum. tempat tinggal orang tua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri maupun Swasta di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

Orang tua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya sebaliknya orang tua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk menyekolahkan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang khususnya dalam berkaitan dengan Rencana Wajib Belajar sembilan tahun Mengemukakan sebagai berikut:

Permasalahan yang harus diperhatikan dalam wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang antara lain: keadaan sosial budaya masih adanya anggapan sebagian orang tua bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin hari depan yang lebih baik bagi anaknya terbukti banyaknya lulusan SLTP, SLTA dan sarjana masih menganggur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa factor yang menghambat keberhasilan Implementasi program pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang yaitu Faktor lingkungan social, ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah dan minim sangat mempengaruhi tingkat menjadi salah satu penghambat tingkat keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun; Faktor geografis dan dan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan sekolah sekitar 3-4 jam dengan moda transportasi yang minim dan sulit menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai, kabupaten Sintang. Ketika musim hujan anak didik sampai di

sekolah dengan pakaian yang basah dan kotor dikarenakan lumpur, sementara saat kondisi kemarau siswa datang di sekolah dengan kondisi penuh keringat dan Lelah; Faktor lingkungan politik dalam pendidikan terkait program wajib belajar sembilan tahun dipengaruhi oleh kebijakan penyediaan sarana sekolah seperti fasilitas gedung, ruan kelas, meja, kursi, dan peralatan pendidikan yang masih minim. Infrastruktur teknologi dan jaringan listrik dan internet yang belum memadai menjadi faktor penghambat tercapainya program wajib belajar sembilan tahun dan Minimnya tenaga pendidik yang berkualitas di daerah pedesaan dan pedalaman kecamatan Dedai ikut berkontribusi bagi kurang berhasilnya program wajib belajar sembilan tahun. Satu sekolah hanya memiliki tenaga guru berjumlah 4-5 orang sehingga belum optimal dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Dedai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analysis of education autonomy policy in Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci>
- Brown, K. M., Benkovitz, J., Muttillio, A. J., & Urban, T. (2011). Leading schools of excellence and equity: Documenting effective strategies in closing achievement gaps. *Teachers College Record*, 113(1), 57–96. <https://eric.ed.gov/?q=>
- Daniel Dike. (2017). Pendidikan multikultural sekolah dasar di wilayah 3T. *Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa*, 3(1), 277–287. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/index>
- Dike, Daniel, & Parida, L. (2016). Persepsi dan konsepsi mutu pendidikan sekolah dasar. *Pendidikan Dasar PerKhasa*, 2, 197–211. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/article/view/112/122>
- Dike.D. (2017). Pendidikan multikultural sekolah dasar di wilayah 3T. *Pendidikan Dasar PerKhasa*, 3(April), 277–287. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/article/view/112/122>
- Dike, D., Parida, L., & Stevanus, I. (2020). Micro strategy and character educational transformation in elementary school during the covid-19 pandemic of sintang distric, west kalimantan province. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(8), 775–786. https://ejmcm.com/article_3196.html
- Dike, D., Parida, L., & Welerubun, I. (2020). Teachers' awareness on multicultural values and attitudes: A case of multicultural education in Indonesian elementary schools. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 823–830. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.151>
- Elvira, E. (2021). Faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan dan cara mengatasinya (Studi pada sekolah dasar di desa Tonggolobibi). *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16(2), 93–98. <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i2.1602>
- Firmansyah, F., & Sumarno. (2013). Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia Periode 1994-2008. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 198–203. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2387>
- Ghazali, I., Wibawa, Z. T., Fauzi, M. L. N., & Anggraini, S. N. (2022). Analisis kebijakan pendiidkan. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 67. <https://doi.org/10.24127/att.v5i2.1605>

- Handoyo, A. D., & Zulkarnaen. (2019). Faktor-faktor [enyebab pendidikan tidak merata di indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 21–24. <https://bimawa.uad.ac.id/wp-content/uploads/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>
- Herwanto. (2007). Wajib belajar sembilan tahun (wajar) dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan dasar. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 16, 77–86. <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id>
- Ishak, D. (2021). Menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih baik di indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 4(2), 53–59. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.513>
- Ismail. (2014). Analisis arah kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkualitas di kota makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 15–29. <https://ojs.unm.ac.id>
- Kawulich, B. (2004). Qualitative data analysis techniques. *Conference: RC33 (ISA), January 2004*, 96–113. https://www.researchgate.net/publication/258110388_Qualitative_Data_Analysis_Techniques/link/5550bba708ae93634ec9ed30/download
- Masino, S., & Niño-Zarazúa, M. (2016). What works to improve the quality of student learning in developing countries? *International Journal of Educational Development*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.012>
- Maxwell, J. A., & Rebold, L. E. (2015). Qualitative Research. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 685–689). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10558-6>
- Pardede, H., & Herman. (2020). A study of speech act between seller and buyers in ‘sinaga shop.’ *Wiralodra English Journal*, 4(1), 65–81. <https://doi.org/10.31943/wej.v4i1.87>
- Paris, D. (2012). Culturally Sustaining Pedagogy: A Needed Change in Stance, Terminology, and Practice. In *Educational Researcher* (Vol. 41, Issue 3, pp. 93–97). <https://doi.org/10.3102/0013189X12441244>
- Pratama.M. (2016). Tinjauan wilayah dan kawasan kabupaten sintang. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang*, 3(2), 146–159. <http://e-journal.uajy.ac.id>
- Risnawan, W. (2017). Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3), 511–518. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>
- Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan*. 104.
- Rulinawaty, Arifin, S., & Samboteng, L. (2020). Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy become agile? *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(1). <http://iratde.com/index.php/jtde>
- Rulinawaty, R., Priyanto, A., Kuncoro, S., Rahmawaty, D., & Wijaya, A. (2023). Massive Open Online Courses (MOOCs) as Catalysts of Change in Education During Unprecedented Times: A Narrative Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 53–63. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.6697>
- Rulinawaty, Samboteng, L., Purwanto, A. J., Kuncoro, S., Jasrial, Tahilili, M. H., Efendi, Y., & Karyana, A. (2024). Investigating the influence of the updated DeLone and McLean information system (IS) success model on the effectiveness of learning management system (LMS) implementation. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2365611>
- Rusdiana, A. (2015). Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi. In *Pustaka*

- Setia* (p. 36). Pustaka Setia. <https://etheses.uinsgd.ac.id/11509/1/Kebijakan Pendidikan.pdf>
- Soedjono. (2022). Transformasi digital manajemen pendidikan. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran*, 16(1), 103–107. <https://doi.org/https://dx.org/10.26877/mpp.v16i1.12148>
- Tim Wikipedia Kabupaten Sintang. (2023). *Kabupaten Sintang*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.